

KEPEMIMPINAN ETNOPEDAGOGI DI SEKOLAH¹

Priadi Surya²
Universitas Negeri Yogyakarta
priadisurya@uny.ac.id

Abstract

Indonesia as a nation of the world face globalization, including the education. To strengthen the nation's character, the educational leadership is one of the important aspects in preparing the younger generation based on national culture and global perspective. Ethno-pedagogy is an alternative in the strengthening the national cultural values in education. Indigenous knowledge systems and local wisdom are deals with the foundation of the global values. The task of education leaders synergize the values of the local excellence with global excellence. In fact, it can bring the values of the local advantages to the world. Ethno-pedagogy leadership is an alternative effort in shaping the nation culture's character-based youth. Ethno-pedagogy leadership encourages principals to be able to develop a sensitivity to the local knowledge as well as respect for cultural identity, intercultural tolerance, the development of cultural attitudes which are responsive, improving academic skills, increased knowledge of cultural diversity, improve the ability of the analysis and interpretation of cultural behavior, and increase critical awareness of local culture.

Keywords: ethno-pedagogy, education leadership, values.

Pengantar

Guru profesional memiliki tanggung jawab untuk membangun karakter bangsa dan budaya. Sunaryo Kartadinata memberikan pengantar dalam *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi* (Dasim Budimansyah, et al. 2010: vii) ada beberapa indikator untuk membangun karakter bangsa dan budaya melalui pendidikan. Pertama, pendidikan karakter tidak perlu diberikan dalam mata pelajaran yang terpisah, tapi terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kedua, selain mengajar dalam bentuk pesan, pembinaan pendidikan karakter bangsa diupayakan melalui penciptaan kondisi (*conditioning, modeling*), pembiasaan, bahkan melalui imbalan dan hukuman. Ketiga, perlu revitalisasi, elaborasi, dan memperkuat nilai-nilai sosial yang menjadi identitas nasional sebagai pesan utama dari pendidikan karakter, atau melalui apa yang dikenal sebagai etnopedagogi. Keempat, pendidikan karakter sulit dicapai jika pendidikan hanya menekankan aspek kognitif, atau hanya berorientasi pada mendapatkan nilai. Kelima, meskipun keluarga dan sekolah diakui sebagai lembaga dan agen utama pendidikan karakter, diperlukan keterlibatan semua pihak. Partisipasi semua pihak yang diperlukan untuk mempromosikan nilai-

¹ Artikel dimuat di Majalah Ilmiah Dinamika UNY bulan Mei 2011

² Dosen Tetap Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

nilai sosial yang baik serta mengurangi pandangan dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekolah sebagai pusat kebudayaan, harus dipimpin oleh kepala sekolah yang kuat yang mengakomodasi nilai lokal sebagai dasar ke arah globalisasi. Pendidikan adalah transformasi budaya, yang sebagai pedoman, arah, dan kesepakatan prosedural di sekolah. Membudayakan dapat didefinisikan sebagai tempat pelestarian atau konservasi, pengayaan, perluasan, kreativitas dan transfer dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat terjadi di sekolah. Kepala sekolah membuat guru dan siswa berbudaya untuk memiliki kemampuan nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka diharapkan untuk menghadapi hidup dari yang sederhana sampai tantangan yang kompleks. Proses ini harus dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan setempat masing-masing.

Kepemimpinan etnopedagogi mengadopsi beberapa nilai-nilai dari teori pedagogi, kepemimpinan, dan budaya lokal. Intinya adalah memimpin sekolah dengan kombinasi nilai-nilai global dan lokal. Indonesia tergolong dalam negara berkembang yang memiliki nilai-nilai tertentu. Dipengaruhi oleh globalisasi, Indonesia harus mengadopsi inovasi dari negara-negara maju dan beradaptasi ke dalam nilai-nilai lokal. Peran pemimpin sekolah adalah untuk mengadopsi, mengadaptasi, dan mentransformasikan inovasi dan nilai-nilainya ke nilai-nilai lokal sekolah dengan harmonis. Nilai-nilai etnis lokal umumnya digunakan di setiap sekolah, serta nilai-nilai global yang tidak bertentangan. Pertumbuhan dan perkembangan budaya sangat tergantung pada pola pikir dan perilaku manusia itu sendiri dalam menerima rangsangan dari luar atau dari dalam. Setiap perubahan nilai sosial di antara orang-orang yang sekarang terjadi. Perlu upaya untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Salah satu upaya adalah bagaimana mengembangkan guru dan siswa melalui penilaian nilai atau latar belakang sosial-budaya. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan budaya nasional yang kuat yang dapat memperkuat solidaritas dan menyatukan bangsa, sekaligus bisa menjadi kebanggaan nasional. Hal ini diyakini bahwa sekolah itu terkandung nilai-nilai sosial-budaya masyarakat (*local genius, local wisdom*), dan memiliki fungsi sosial sebagai penguat nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara kita. Menurut William R. Bascom (1954) ada empat fungsi itu, yaitu pertama sebagai sistem proyeksi, sebagai refleksi dari sebuah pemikiran kolektif, itu membuat orang mengalihkan diri dari represi yang dikenakan terhadap mereka oleh masyarakat. Kedua, sebagai instrumen

ratifikasi institusi dan lembaga kebudayaan, memvalidasi budaya, membenarkan ritual dan lembaga untuk mereka yang melakukan dan mengamati mereka. Ketiga, sebagai alat pendidikan, alat pedagogik yang memperkuat moral dan nilai-nilai dan membangun kecerdasan. Keempat, sebagai sarana penegakan dan pengawasan untuk norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi kolektif, merupakan suatu cara menerapkan tekanan sosial dan melaksanakan kontrol sosial.

Sebagai institusi pendidikan, sekolah membutuhkan pemimpin bagi kebudayaan. Sekolah menyediakan inovasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi siswa terhadap globalisasi. Mereka menerima banyak hal untuk menghadapi kehidupan modern, namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Pengetahuan lokal atau *indigenous knowledge* juga mempengaruhi pemimpin untuk menggerakkan warga sekolah. Berdasarkan definisi *indigenous knowledge*, penulis memahami pengetahuan lokal tradisional sebagai keseluruhan dari warisan intelektual dan budaya dari sekelompok masyarakat adat yang membentuk identitas mereka yang berbeda, dipertahankan dan dikembangkan melalui transmisi dari generasi ke generasi dengan cara mereka sendiri yang berbeda dan berkaitan dengan dan berkembang dalam ruang fisik yang berbeda. Definisi ini menekankan adanya sistem epistemologis tertentu pemahaman tentang dunia dan diri sendiri dalam dunia ini. Sistem ini meliputi unsur-unsur seperti: ide (konsep, persepsi, etika, estetika), artefak (sistem simbol terminologi, petroglyphs, peralatan, tari dan lagu) dan situs suci (baik yang berasal dari alam dan non-alami). (Erjen Khamaganova, 2005).

Etnopedagogi di Sekolah

Etnopedagogi adalah praktik pendidikan berbasis pengetahuan lokal dalam berbagai aspek kehidupan. Ini akan tumbuh menjadi ethnophilosophy, ethnopsychology, ethnomusicology, ethnopolitics, dan lain-lain. Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (*indigenous knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka. Ini termasuk cara mengamati dan mengukur lingkungan, memecahkan masalah, dan memvalidasi informasi. Singkatnya, kearifan lokal adalah proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. (Alwasilah, 2008)

Menurut A. Chaedar Alwasilah (2008) ada beberapa karakteristik dari kearifan lokal: (1) berdasarkan pengalaman, (2) diuji setelah digunakan selama berabad-abad, (3) dapat disesuaikan

dengan budaya sekarang, (4) terpadu di setiap hari praktik dan lembaga-lembaga masyarakat, (5) umumnya dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan, (6) adalah dinamis dan selalu berubah, dan (7) sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Pemberdayaan melalui adaptasi pengetahuan lokal, termasuk reinterpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah peribahasa, dengan kondisi kontemporer adalah strategi cerdas untuk memecahkan masalah sosial karena dalam banyak hal masalah-masalah sosial yang berasal dari isu-isu lokal juga. Pemimpin lebih mudah untuk mengarahkan anak buahnya dengan norma-norma yang umum di masyarakat dimana pertumbuhan sekolah. Kearifan lokal bisa menjadi kendaraan yang Sinergi tujuan modernisasi dengan pelestarian keunggulan lokal.

Etnopedagogi didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas-budaya. Guru mampu mengajar di setting budaya yang setempat yang mungkin berbeda. Siswa adalah pembelajar lintas budaya. Siswa mana pun di dunia biasanya menunjukkan ada pola pikir serupa. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk memberikan pemahaman baru harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungan setempat. Hal baru dapat dengan mudah diterima jika mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan nilai-nilai lokal. Pendidikan juga menyediakan nilai-nilai universal yang harus ada di setiap nilai order di dunia. Sebaliknya, nilai-nilai lokal yang sangat baik juga bisa diangkat dan disosialisasikan ke dalam dunia yang lebih luas. Pendidikan melalui pendekatan etnopedagogi, melihat pengetahuan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan.

Etnopedagogi terkait erat dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural memuat perangkat kepercayaan yang memandang penting kearifan lokal dan keberagaman yang dimiliki komunitas etnis untuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kelompok sosial maupun negara. Ketika etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan, dilanjutkan dengan pendidikan multikultural yang memberdayakan inovasi dan keterampilan itu agar dapat menyumbangkan masukan positif bagi kelompok sosial lain dan budaya nasional.

Kepemimpinan Etnopedagogi di Sekolah

Kepemimpinan etnopedagogi diusulkan sebagai alternatif untuk kepemimpinan instruksional. Etnopedagogi menggunakan kearifan lokal untuk mengaktifkan pertumbuhan pembelajaran dan intelektual siswa, berbeda dengan pengajaran lain yang memperlakukan siswa

sebagai objek pelaksanaan kurikulum belaka. Etnopedagogi yang sukses membutuhkan guru yang memahami bagaimana siswa belajar dan memiliki otonomi untuk merancang, melaksanakan dan menilai kegiatan pendidikan yang memenuhi nilai-nilai lokal. Peran pemimpin menghimpun informasi praktek guru dan refleksi, memberdayakan guru untuk melaksanakan tanggung jawab profesional dan kebijaksanaan, dan menunjukkan pengetahuan yang kredibel atas nilai-nilai lokal dalam proses belajar dan mengajar.

Mengadaptasi pemikiran Neil MacNeill et al (2003), belajar siswa perlu ditingkatkan karena merupakan aspek penting dari kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan etnopedagogi dapat dipandang sebagai alternatif gaya kepemimpinan sekolah yang berbeda. Dalam pandangan lain, bisa alternatif sebagai salah satu komponen kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan belajar mengajar efektif ditandai dengan atribut khusus dari staf, kepala sekolah dan pelaksana operasional sekolah. Penulis mengusulkan kepemimpinan etnopedagogi yang akan ditunjukkan oleh: Pertama, menjunjung kewajiban moral tentang harapan masyarakat sekolah. Kedua, adanya visi bersama dan misi rasa belajar siswa yang mempertimbangkan kearifan lokal. Ketiga, komitmen untuk realisasi misi oleh staf dan siswa. Keempat, penerapan pengetahuan ahli tentang pembelajaran dan perkembangan siswa. Kelima, peningkatan praktek etnopedagogi. Keenam, keterlibatan dan pemberdayaan staf. Ketujuh, kehadiran kepemimpinan yang didistribusikan ke dalam staf. Kedelapan, penekanan pada fungsi etnopedagogi daripada administratif oleh para pemimpin. Kesembilan, penciptaan dan berbagi pengetahuan di seluruh sekolah. Kesepuluh, pengembangan hubungan dan rasa memiliki dengan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan adat. Kesebelas, penerapan pembudayaan kembali mengenai perbaikan kultur sekolah yang mempertimbangkan kearifan lokal.

Etnopedagogi yang harus menjadi peran utama dalam semua aspek tentang transfer pengetahuan antargenerasi adat tradisional melalui bentuk sarana dan metode pendidikan. Kepemimpinan etnopedagogi ini untuk pembentukan keterampilan untuk akuisisi kearifan lokal dan sinkronisasi isu pendekatan berbasis masyarakat. Perlu pengakuan hak-hak guru dan anak-anak untuk mengetahuinya, penerapan pengetahuan tradisional sendiri, untuk menghidupkan dan melindungi serta mengembangkan budaya sendiri.

Indonesia telah menerapkan desentralisasi pemerintahan sejak tahun 1999. Ada tiga model pendidikan desentralisasi, (1) manajemen berbasis lokasi, (2) kewenangan pemerintah pusat berkurang, dan (3) inovasi kurikulum. (Irianto dan Sa'ud, 2010). Menggunakan kebijakan

desentralisasi pendidikan, kepala sekolah harus mengakomodasi aspek berharga lokal pada kepemimpinannya. Sekolah memiliki wewenang lebih besar untuk mengelola sendiri. Inovasi kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas siswa dan kesetaraan. Ini disinkronkan dalam kebutuhan siswa di sekolah. Kemudian, menyebar ke daerah yang bervariasi. Kepemimpinan etnopedagogi adalah salah satu komponen paling berharga untuk memenuhi desentralisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki nilai-nilai tradisional yang berdasarkan adat setempat di seluruh kepulauan Indonesia.

Kepemimpinan etnopedagogi menuntut kepala sekolah untuk dapat mengembangkan sensitivitas terhadap kearifan lokal sekaligus penghormatan pada identitas budaya, toleransi antarbudaya, pengembangan sikap budaya yang responsif, peningkatan kemampuan akademik, peningkatan pengetahuan mengenai kemajemukan kebudayaan, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan meningkatkan kesadaran kritis tentang kebudayaannya sendiri.

Kepemimpinan Etnopedagogi Berciri Jawa

Kepemimpinan etnopedagogi yang didasarkan nilai-nilai tradisi Jawa telah diungkap oleh beberapa ahli. Nilai kepemimpinan pendidikan Jawa yang paling dikenal luas adalah konsep kepemimpinan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 3 aspek kepemimpinan yaitu (1) *ing ngarsa sung tuladha*, (2) *ing madya mangun karsa*, dan (3) *tut wuri handayani*. Konsep kepemimpinan pendidikan ini bahkan diadopsi menjadi nilai pendidikan nasional di Indonesia.

Ing ngarsa sung tuladha menekankan peran pemimpin sebagai tokoh yang harus bisa diteladani, yang harus bisa membimbing dan memberi arah ke mana pendidikan di sekolah hendak dibawa.

Ing madya mangun karsa artinya bahwa pemimpin pendidikan harus bisa membangkitkan semangat orang-orang yang beliau pimpin. Harus dapat membangkitkan gairah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pemimpin pendidikan adalah juga seorang motivator.

Pemimpin pendidikan harus mampu juga bersikap *tut wuri handayani*, yaitu mampu memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang. Pemimpin pendidikan dikatakan berhasil ketika dia mampu mengedepankan orang lain terlebih dulu. Keberhasilan kepemimpinan

pendidikan terkait dengan keberhasilan dia membuat orang-orang yang dipimpinnya berhasil. Secara hakiki pemimpin pendidikan adalah seseorang yang memegang kendali untuk membuat orang lain mendapatkan kendali. Kewenangan yang dimiliki pada hakekatnya adalah kewenangan untuk memungkinkan orang lain memiliki kendali atas pekerjaan dan kehidupannya.

Ahli tradisi Jawa menelaah naskah-naskah tradisional Jawa yang secara filosofis menjadi salah satu acuan bagi pemimpin di sekolah. Sri Sultan Hamengku Buwono X (2003:51-55) mengemukakan prinsip-prinsip kepemimpinan Sultan Agung seperti diungkapkan lewat Serat Sastra Gendhing, yang memuat tujuh amanah bagi pemimpin.

Pertama, *swadana maharjeng tursita*, seorang pemimpin haruslah sosok seorang intelektual, berilmu, jujur, dan pandai menjaga nama, serta mampu menjalin komunikasi atas dasar prinsip kemandirian. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah secara tradisi merupakan guru senior yang telah mengenyam pengalaman dan pendidikan yang mumpuni, serta memiliki keunggulan dibanding guru lainnya. Secara intelektual memiliki pemikiran yang strategis. Arah pengembangan sekolah diterapkan dengan menumbuhkan kemandirian lembaga.

Kedua, *bahni bahna amurbeng jurit*, seorang pemimpin harus selalu berada di depan dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. Kepala sekolah yang baik menjadi contoh yang dapat digugu dan ditiru semua guru dan siswanya. Kepala sekolah berjuang untuk memenuhi hak daripada guru dan siswanya di sekolah.

Ketiga, *rukti setya garba rukmi*, seorang pemimpin harus bertekad bulat untuk menghimpun segala daya dan potensi guna kemakmuran dan ketinggian martabat pengikutnya, masyarakat ataupun bangsa yang dipimpinnya. Kepala sekolah harus dapat menerapkan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan di sekolah. Sumber daya yang potensial harus dapat didayagunakan secara efektif dan efisien. Manajemen berbasis sekolah menjadi wahana kepala sekolah untuk dapat menghimpun sumber daya yang berada di sekitarnya, termasuk sistem pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge system*).

Keempat, *sripandayasih krani*, seorang pemimpin harus bertekad menjaga sumber-sumber kesucian agama dan kebudayaan, agar berdaya manfaat bagi masyarakat luas. Kepala sekolah menjadi pemimpin dalam pembudayaan di lembaga pendidikan. Nilai dan norma yang berasal dari agama dan budaya setempat menjadi pencerah bagi guru dan siswa untuk selanjutnya diterapkan di masyarakat luas.

Kelima, *gaugana hasta*, seorang pemimpin juga harus bisa menciptakan seni sastra, seni suara, dan seni tari guna mengisi peradaban bangsa. Kepala sekolah dapat mendorong guru seni untuk membina kesenian bagi siswa. Pembinaan seni dapat dilakukan dalam mata pelajaran kesenian dan kerajinan tangan maupun ekstrakurikuler kesenian.

Keenam, *stiranggana cita*, disamping bisa menciptakan seni, maka seorang pemimpin harus mampu berfungsi sebagai pelestari dan pengembang budaya, pencetus sinar pencerahan ilmu, dan pembawa obor kebahagiaan umat manusia. Kepala sekolah berkewajiban untuk melestarikan budaya peninggalan leluhur sebagai kebanggaan lembaga. Sekolah sebagai lembaga pembudayaan menjalankan fungsi pelestarian budaya. Sekolah menjadi wahana transformasi nilai-nilai dalam proses pendidikan dari generasi terdahulu kepada siswa sebagai generasi muda. Nilai-nilai ini menjadi arahan bagi siswa dan masyarakat umumnya dalam menjalani hidup.

Ketujuh, *smara bhumi adi manggala*, seorang pemimpin harus memiliki tekad juang lestari untuk menjadi pelopor pemersatu dari pelbagai kepentingan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian di dunia ini.

Kepemimpinan Jawa berikutnya yang layak kita apresiasi dalam pendidikan adalah konsep kepemimpinan yang termuat dalam Serat Wulang Jayalengkara. Arwan Tuti Arta (2009:63) menerangkannya bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki watak *Wong Catur* atau empat hal, yaitu, *retna*, *estri*, *curiga*, dan *paksi*.

Retna atau permata, wataknya adalah pengayom dan pengayem, karena khasiat batu permata adalah untuk memberikan ketenteraman dan melindungi diri. Pemimpin pendidikan harus mampu menjadi pelindung bagi yang guru dan siswanya, mampu menciptakan rasa tentram dalam hati mereka.

Estri atau wanita wataknya adalah berbudi luhur, bersifat sabar, bersikap santun, mengalahkan tanpa kekerasan atau pandai berdiplomasi. Pemimpin pendidikan harus memiliki budi luhur, melebihi dari yang dipimpinnnya. Beliau juga harus memiliki kesabaran dan sopan santun yang memadai agar bisa menggerakkan guru dan siswa, tanpa yang bersangkutan merasa terpaksa berbuat karena kalah dalam status dan kedudukan.

Curiga atau keris memiliki ujung yang tajam, oleh karena itu seorang pemimpin pendidikan haruslah memiliki ketajaman berpikir dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang pendidikan.

Paksi atau burung, mengisyaratkan watak yang bebas terbang kemanapun. Pemimpin pendidikan harus bisa mandiri agar dapat bertindak independen tidak terikat oleh kepentingan satu golongan, sehingga pendapat, keputusan, maupun tindakannya bisa menyejukkan semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Kepemimpinan etnopedagogi merupakan sebuah upaya yang memperhatikan nilai-nilai keunggulan lokal dari setiap budaya yang ada di mana sekolah itu berada. Nilai keunggulan lokal ini menjadi dasar bagi pemimpin pendidikan dan guru membekali siswa dengan budaya bangsa yang kuat menghadapi derasnya budaya asing akibat globalisasi. Mengoptimalkan kebijakan desentralisasi pendidikan, kepala sekolah harus mengakomodasi aspek berharga lokal pada kepemimpinannya. Kepemimpinan etnopedagogi mendorong kepala sekolah untuk dapat mengembangkan sensitivitas terhadap kearifan lokal sekaligus penghormatan pada identitas budaya, toleransi antarbudaya, pengembangan sikap budaya yang responsif, peningkatan kemampuan akademik, peningkatan pengetahuan mengenai kemajemukan kebudayaan, meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan meningkatkan kesadaran kritis tentang kebudayaannya sendiri.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A.C. (2008). *Tujuh Ayat Etnopedagogi*. Artikel dalam *Pikiran Rakyat Bandung*, 23 Januari 2008
- Arta, Arwan Tuti. (2009). *Laku Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa Menuju Istana*. Yogyakarta: Galangpress.
- Bascom, W. (1954). "Four Functions of Folklore," *Journal of American Folklore*. [http://en.wikipedia.org/wiki/William_Bascom]. Tersedia: 2 Maret 2011
- Budimansyah, Dasim. et al (2010). *Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Penguatan PKn, Layanan Bimbingan Konseling dan KKN Tematik di Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Irianto, Y.B. & U.S. Saud. (2010). *Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional*. Chapter on *Manajemen Pendidikan* by Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI. Bandung: Alfabeta.

Khamaganova, Erjen. (2005). *Traditional Indigenous Knowledge: Local View*. Paper presented in International Workshop on Traditional Knowledge. Panama City, 21-23 September 2005

MacNeill, N. et al (2003). *Beyond Instructional Leadership: Towards Pedagogic Leadership*. Auckland: Australian Association for Research in Education

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (2003). *Sabda Ungkapan Hati Seorang Raja*. Yogyakarta: PT. BP Kedaulatan Rakyat.

Curriculum Vitae

Identitas diri

Nama : Priadi Surya, S.Pd., M.Pd.
NIP : 19811111 200912 1 001
Tempat Tanggal Lahir : Bandung 11 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Kawin
Agama : Islam
Pangkat : Penata Muda Tk I
Golongan Terakhir : III/b (1 Desember 2009)
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Alamat Kantor : AP FIP UNY Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281.
Telp. (0274) 550842; 586168 Psw. 342. Fax (0274) 540611
Alamat Rumah : Giwang Pratama Estate A17 Yogyakarta
E-Mail : priadisurya@yahoo.com
Handphone : 0818619490

Pendidikan Formal

1. SDN Tunas Harapan I Kota Bandung (1988-1994)
2. SMPN 9 Kota Bandung (1994-1997)
3. SMUN 1 Kota Bandung (1997-2000)
4. S1 Administrasi Pendidikan FIP Universitas Pendidikan Indonesia (2000-2005)
5. S2 Administrasi Pendidikan SPs Universitas Pendidikan Indonesia (2005-2007)

Pendidikan Nonformal

1. Pendidikan dan Pelatihan Guru-Dosen Internasional. 2-3 Juni 2008. STKIP Pasundan Cimahi.
2. Pelatihan Metodologi Penelitian Tingkat Nasional. 26-27 Agustus 2008. Yayasan Bina Insan Equator Bandung.
3. English For Academic Purposes. 2010. P3B UNY.
4. TOEFL Preparation. 2010. P3B UNY.
5. IELTS Preparation. 2010. P3B UNY.
6. Pelatihan *Achievement Motivation Training (AMT)*. 2010. UNY.

Riwayat Pekerjaan

1. Pengajar Bimbingan Belajar Teknos Genius Cimahi (2008)
2. Pengajar Bimbingan Belajar B Smart Bandung (2008)
3. Asisten Kepala Sekolah SMP Narada National Plus Yayasan Buddhis Theravada Indonesia Jakarta (2009-2010)
4. Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY (2009-sekarang)

Pengajaran

1. Mata kuliah Manajemen Pendidikan
2. Mata kuliah Manajemen Peserta Didik

Penelitian

1. Pengaruh Pengawasan Oleh Kepala Sekolah Terhadap Disiplin Kerja Guru Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bandung Kulon (Skripsi, 2005)
2. Kontribusi Pengembangan Karier dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pembantu Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Cimahi (Tesis, 2007)

Pengabdian Pada Masyarakat

1. Pendampingan Penyusunan Kurikulum Berstandar Nasional dan Internasional (Kurikulum Nasional Plus) di SMP Narada Jakarta Barat (2010).

Seminar

1. Seminar Nasional Profesionalisasi Guru. SPs UPI. 2005.